

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.
- Abdulkadir Muhammad, 2007, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Aminuddin Ilmar, 2022, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Makassar: Phinatama Media.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budi Untung, 2015, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama.
- _____, 2011, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung: Refika Aditama.
- _____, 2013, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama.
- _____, 2014, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun. 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- _____, Muhammad Hafidh, 2017, *Akta Notaris untuk Perbankan Syariah*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- _____, 2023, *Hukum Protokol Notaris*, Bandung: Refika Aditama.

- _____ dan Rusdianto Sesung, 2020, *Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang- Undang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hans Kelsen, 2007, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni
- Irmawan Hudoyo, 2017, *Kedudukan Akta Otentik*, Jakarta: Pamator Press.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media
- _____, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Johani Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi.
- M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Notaris*, Yogyakarta: UII Press.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prajudi Atmosudirjo, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Ke-14, Jakarta: Rajawali Press.

- Satjipto Rahardjo, 2005, *Ilmu Hukum*, Jakarta: Pena Media.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Surabaya: CV. Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 1988, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Ramadja Karya, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sulhan, et.al., 2018, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Tan Tong Kie, 2000, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktik Notaris*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Yasid Abu, 2010, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Reformasi Hukum dan Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Penataan Kelembagaan Kementerian di Bidang Hukum, HAM, dan Regulasi Nasional.

Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

Peraturan Kepala ANRI Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Alih Media Arsip.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (2022). Buku Pedoman Pengawasan Notaris. Jakarta: Kemenkumham.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2021). Laporan Tahunan DUKCAPIL Tahun 2021.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). Laporan Tahunan Kinerja KPK: Integrasi Sistem Informasi Digital.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Panduan Implementasi E-Court dan E-Litigation.

JDIH Kementerian Hukum dan HAM. (2022). Pedoman Pengelolaan Dokumen Hukum Elektronik Nasional.

DISERTASI, TESIS DAN JURNAL

- Agustianto, 2022, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Penyimpanan Protokol Notaris di Provinsi Kepulauan Riau*, Jurnal Justisi, Volume 9 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, Riau, hlm. 30-43
- Cho, H., & Kim, J. (2020). *The Evolution of Notary Practices and Record Keeping in South Korea*.
- Cut Era Fetiyeni, 2012, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 14 Nomor 58, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, hlm. 392.
- Diki Zukriadi, Et.Al., 2021, *Analisis Yuridis Pengaturan Jangka Waktu Notaris Dalam Menerima dan Menyimpan Protokol Notaris di Indonesia*, Jurnal Cahaya Keadilan, Volume 9 Nomor 1, Universitas Putera Batam, Batam, hlm. 1-22
- Dwi Kukuh Verdyandika, Et.Al., 2021, *Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun atau Lebih*, Jurnal Mercatoria, Volume 14 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 77-87
- Indrajit, R. E. (2004). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Jingga Mulia, 2022, *Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal of Administration Law Mendapo, Volume 3 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, hlm. 223-241
- Kurniawan, D. (2019). *Urgensi Digitalisasi Dokumen Hukum di Era Industri 4.0*. Jurnal Administrasi Hukum, 11(1), 45–52.
- Lee, S. (2017). *Digital Notarial Archives in Korea: A Case Study of NRMS*. Korea Legal Review.
- Louise Andriani Rasan, 2017, *Tanggung Jawab Majelis Pengawas Daerah Terhadap Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Mohd, A. (2022). *The Role of National Archives in Notarial Record Keeping in Malaysia*.
- Myra Ghazala, 2022, *Urgensi Pengaturan Penyimpanan Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara dengan Sistem Elektronik di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 10 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 696-705

- Novinati Fathiyyah, 2024, Hakikat Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang meninggal Dunia dalam Hal Penyimpanan Protokol Notaris, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Putra, A. R. (2021). Digitalisasi Protokol Notaris dalam Perspektif E-Government. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 9(2), 123–135.
- Ria Trisnomurti dan I Gusti Bagus Suryawan, 2017, *Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris*, Jurnal Notariil, Volume 2. Nomor 2. Warmadewa Press, hlm. 128. Agustianto, Agustianto, 'Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Di Provinsi Kepulauan Riau', *Justisi*, 9.1 (2023), pp. 30–43, doi:10.33506/jurnaljustisi.v9i1.2002
- Noer, Zakiah, and Yuli Fajriyah, 'J PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI ARSIP NEGARA', *Jurnal Pro Hukum*, 10 (2021), Pp. 80–89
- Riansyah, Rifqi Mufid, and Disriani Latifah Soroinda, 'PERBANDINGAN PROFESI NOTARIS DAN IMPLEMENTASI JURNAL NOTARIS DI NEGARA BAGIAN NEW YORK DAN PROTOKOL NOTARIS DI INDONESIA DALAM ERA REFORMASI TEKNOLOGI', *PALAR (Pakuan Law Review)*, 10 (2024), pp. 43–66, doi:https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
- Rosa, Meilina, 'Penyimpanan Protokol Notaris Dengan Konsep Elektronik Dengan Cyber Notary Meilina Rosa Fakultas Hukum Universitas Jambi , Jambi , Indonesia Abstract Perkembangan Teknologi Informasi Secara Signifikan Telah Merubah Sistem Informasi Yang Berbasis Konvensional', *Recital Review*, 6 nomor 2 (2024), pp. 220–35
- Shamsudin, S. (2021). *Notarial Archives and the Digital Transformation in Malaysia*. Malaysian Journal of Legal Studies.
- Setiawan, H. (2020). Digitalisasi Protokol Notaris dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 101–112.
- Taufik, Muhammad, 'Tanggung Jawab Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Yang Melebihi Jangka Waktu 25 Tahun' (Universitas hasanuddin, 2020)
- Tiara Karlina, 'Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Penyimpanan Protokol Notaris ', *Badamai Law Journal*, 9.1 (2024), pp. 120–34
- Van Dijk, P., & Ploeger, L. (2018). *Digital Archives and Notarial Records in the Netherlands*.
- Zakiah Noer Dan Yuli Fajriyah, 2021, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara*, Jurnal Pro Hukum,

Volume 10 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Gresik, Gresik, hlm. 80-89

Zarfinal Dan Desmal Fajri, 2021, *Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pemeriksaan Protokol Notaris*, Jurnal Jurisprudencia Ham dan Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 44-51.

WAWANCARA

Andi Lola Rosalina, Notaris dan PPAT di Kota Makassar

Brilian Thioris, Notaris dan PPAT di Kota Makassar

Hustam Husain, Notaris dan PPAT di Kota Makassar

Irwan, Kepala UPT Jasa Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Selatan

Ria Trisnomurti, Notaris dan PPAT di Kota Makassar

Sukwanto Tandi, Notaris dan PPAT di Kabupaten Gowa

Tjhin Jefri Tanwil, Notaris dan PPAT di Kabupaten Gowa

Rahman Syamsuddin, Majelis Pengawas Daerah Notaris Wilayah Takalar

Syarif, Perancang Undang-undang Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Sulawesi Selatan

Syaiful Gazali, Pelaksana Sub bidang Pelayanan AHU Kanwil Kementerian
Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

ARTIKEL

Abdul halim, 2022, *Sampai Kapan Minuta Akta Notaris Disimpan*, artikel
baritopost.co.id.

Kompas.com, 2024. Sistem Penyimpanan Mobil dan Motor Sitaan KPK
Adopsi dari US Marshal, Artikel
Kompas.com. <https://otomotif.kompas.com/read/2024/11/20/1621005>

15/sistem-penyimpanan-mobil-dan-motor-sitaan-kpk-adopsi-dari-us-marshall.

Artikel Kanwil kumham, 2024, <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-utama/rakor-penguatan-pembinaan-dan-pengawasan-jabatan-notaris-upayakan-perubahan-berarti-dalam-dunia-kenotariatan>

Artikel Mahkamah Agung, 2023, Pengelolaan Arsip Perkara Secara Digital guna mewujudkan badan Peradilan Yang Agung, https://mahkamahagung.go.id/id/berita/5720/pengelolaan-arsip-perkara-secara-digital-guna-mewujudkan-badan-peradilan-yang-agung?utm_source=chatgpt.com

Artikel Kejaksaan, 2024, Jaksa Agung ST Burhanuddin Menerima Penghargaan Sebagai “TOKOH KEARSIPAN”, https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/792/read?utm_source=chatgpt.com

Artikel Hukum Online, 2021 Begini Aturan Pendaftaran dan Sertipikat Tanah Secara Elektronik, https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-aturan-pendaftaran-dan-sertipikat-tanah-secara-elektronik-lt600e73174c985/?utm_source=chatgpt.com

Artikel BPN, 2021, Mitigasi Implementasi PERMEN Nomor 1 Tahun 2021. https://ppid.kamparkab.go.id/public/dokumen/2021/02/6d2a83cfe4f546e402919cd76077e589.pdf?utm_source=chatgpt.com

Artikel Kompas.com, 2021, Sistem Keamanan Sertifikat Tanah Elektronik Diragukan https://www.kompas.com/properti/read/2021/02/04/160000921/sistem-keamanan-sertifikat-tanah-elektronik-diragukan?utm_source=chatgpt.com